

PENGUATAN HAK RESTITUSI ASET KORBAN INVESTASI ILEGAL YANG DISITA OLEH NEGARA

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh peningkatan minat investasi masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa munculnya entitas investasi ilegal di tengah masyarakat. Investasi ilegal adalah salah satu kejahatan yang merugikan kehidupan masyarakat. Untuk melindungi korban investasi ilegal, negara berkewajiban untuk melindungi masyarakat melalui cara restitusi. Namun, dalam praktiknya, hak restitusi terhadap korban investasi ilegal yang aset pelaku disita oleh negara masih belum berjalan optimal, meskipun berbagai regulasi telah mengakomodir hak korban untuk memperoleh restitusi, tetapi pengaturannya restitusi di Indonesia masih lah memiliki kelemahan. Penulis berharap melalui penulisan ini masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait praktik penipuan investasi ilegal pada kasus aplikasi investasi ilegal yang sedang marak saat ini dan pembaharuan pengaturan restitusi yang mencakup seluruh tindak pidana yang menimbulkan kerugian kepada korban secara langsung. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu hukum positif di Indonesia dan dokumen resmi yang terkait dengan ketentuan hukum, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, jurnal hukum, dan internet. Hasil penelitian ini, mencoba mengulas tentang regulasi dan mekanisme pengembalian kerugian korban melalui restitusi yang didasari oleh KUHPidana, KUHAPidana dan Undang-undang diluar KUHAPidana, serta membahas faktor penyebab terjadinya investasi ilegal dan pengaturan restitusi yang ideal bagi korban investasi ilegal.

Kata Kunci : Investasi ilegal, Restitusi, dan korban

STRENGTHENING THE RIGHTS OF ASSETS RESTITUTION OF ILLEGAL INVESTMENT VICTIMS CONFIDENTIAL BY THE STATE

ABSTRACT

The growth of the Indonesian economy is supported by the increasing interest of the public in investing. This does not rule out the possibility of the emergence of illegal investments that harm the public. To protect victims of illegal investments, the state provides the right to restitution, which is the right of the victim to obtain compensation from the perpetrator of the crime. However, in practice, the right to restitution for victims of illegal investments whose assets are seized by the state is still not optimal. This is due to a number of factors, such as the lack of socialization about restitution to the public, the limited budget of the state to pay restitution, and the complicated process of managing restitution. This study uses normative legal research based on primary legal materials in the form of legislation, official documents related to legal provisions, as well as secondary legal materials in the form of books, articles, legal journals, and the internet. The results of this study discuss the regulations and mechanisms for returning victims' losses through restitution based on the Criminal Code (KUHPidana), the Criminal Procedure Code (KUHAPidana), and laws outside the Criminal Procedure Code. In addition, the study also discusses the factors causing the occurrence of illegal investments and the ideal restitution arrangement for victims of illegal investments.

Keywords: Illegal investment, restitution, and victim